

## PENGEMBANGAN INOVASI MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN PACITAN

Dewi Ismoyowati<sup>1\*</sup>, Izza Mafruhah<sup>2</sup>, Nunung Sri Mulyani<sup>3</sup>, Nurul Istiqomah<sup>4</sup>

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
  2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
  3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
  4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
- E-mail Korespondensi: dewiismoyowati@staff.uns.ac.id

---

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mendapatkan potret program dan kegiatan yang telah/ sedang dilaksanakan saat ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa; (2) Mengetahui dan menganalisis situasi faktor pendorong dan faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan aktivitas inovasi model pemberdayaan masyarakat desa; (3) Merumuskan rekomendasi konsep untuk pengembangan inovasi model pemberdayaan masyarakat desa secara komprehensif dan terintegratif di Kabupaten Pacitan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) analisis deskriptif kualitatif dengan bantuan indepth interview dan FGD, (2) analisis kuantitatif dengan menggunakan AHP. Sumber data diperoleh dari SKPD dan kecamatan serta desa yang digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini wilayah penelitian dibedakan menjadi desa pesisir, desa pegunungan dan desa pertanian lahan datar. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemberdayaan di Kabupaten Pacitan cenderung dipicu oleh program kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Sedangkan peran masyarakat sebagai pelaku dari kegiatan tersebut, swadana masyarakat ditunjukkan dalam bentuk tenaga atau kegotongroyongan yang ada di lingkungan. Jenis kegiatan terdiri atas pembangunan fisik, pelatihan, simpan pinjam serta bantuan operasional organisasi. (2) Faktor yang mendorong pemberdayaan masyarakat terdiri atas 3 faktor utama yaitu faktor internal, faktor kelembagaan dan faktor eksternal. Sedangkan masing-masing memiliki faktor turunan yang memberikan pengaruh terhadap program pemberdayaan. (3) Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa ternyata tipologi daerah tidak memberikan perbedaan perlakuan dan model dalam pemberdayaan masyarakat, hanya sasarannya saja yang dirubah. (4) Model pemberdayaan yang perlu diinisiasi untuk tiap wilayah membutuhkan peran serta yang menyeluruh baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi dan bisnis dalam kegiatan pemberdayaan di Kabupaten Pacitan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Tipologi Desa, Model Inovatif

**JEL Classification :** O44, Q50, O10

---

### 1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat menekankan fokus pembangunan untuk pertumbuhan (*pro growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro job*), penanggulangan kemiskinan (*pro poor*), hingga membuka sumbatan (*debottlenecking*) ekonomi, yaitu *supporting program* yang terdiri atas pembenahan infrastruktur, menjamin kesinambungan pasokan energi, pembenahan aspek birokrasi seperti peraturan perundangan dan perijinan. Program-program tersebut akan disinkronkan antara program pemerintah pusat dan daerah dan *stakeholders* lain agar bisa mendukung pemberdayaan masyarakat (Budiharsono, 2004; Lipton & Ravallion, 1995; LP3ES, 2006; Mafruhah & Tuhana, 2008; Partoatmodjo, 2004; Wardhani & Harjadi, 2004b, 2004a).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, ter-

padu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui *pembangunan inklusif*, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Pembangunan yang *inklusif* diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa sendiri merupakan sebuah strategi pembangunan, dengan dasar pandangan bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan pada akar permasalahannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat desa. Peningkatan ini dapat ditempuh melalui langkah (a) Membuat peraturan atau kebijakan yang berpihak pada yang lemah dan miskin; (b) Memberikan suasana dan iklim yang memungkinkan bagi masyarakat desa untuk dapat mengembangkan potensinya; (c) Menjadikan masyarakat desa menjadi berdaya menjalani kehidupan dengan jalan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensinya sehingga tidak tertinggal dalam berperan dan menikmati pembangunan; (d) Memberikan perlindungan kepada yang lemah dan miskin sehingga tidak tertindas. Di sisi lain upaya pemberdayaan masyarakat desa dituntut untuk dapat melihat dan mengantisipasi kondisi ekonomi masyarakat desa yang menunjukkan situasi kondusif bagi pengembangan kewirausahaan, khususnya untuk UMKM termasuk kelompok-kelompok masyarakat (POKMAS).

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mendapatkan potret dari program dan kegiatan yang telah/sedang dilaksanakan saat ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pacitan; 2) Mengetahui dan menganalisis situasi faktor pendorong dan faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan aktivitas inovasi model pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pacitan; 3) Merumuskan rekomendasi konsep untuk pengembangan inovasi model pemberdayaan masyarakat desa secara komprehensif dan terintegratif di Kabupaten Pacitan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan harus diartikan sebagai upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat yang akan digunakan sebagai media pengentasan kemiskinan. Kemiskinan tidak akan bisa lenyap atau dientaskan apabila masyarakat hanya diperlakukan sebagai obyek. Memang terdapat sebagian kecil masyarakat yang membutuhkan *rescue* untuk mempertahankan kehidupannya sehingga harus diberikan bantuan secara langsung, namun sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia merupakan masyarakat miskin produktif, sehingga harus diperlakukan dengan cara yang berbeda (Hassan & Siahaan, 2004; Irawan, 1999; J.Fernández-Moral, Vidueira, Díaz-Puente, & Nicolás, 2015; Wardhani & Haryadi, 2004a).

Pembangunan perdesaan merupakan kerangka pembangunan yang berkelanjutan dengan target peningkatan kondisi sosial ekonomis yang diikuti oleh laju kenaikan jumlah penduduk perdesaan, juga karena corak kehidupan dan penataan masyarakat desa sangat beranekaragam. Pembangunan dalam konteks berkelanjutan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Implisit dalam konsep tersebut terkandung adanya syarat partisipasi murni masyarakat perdesaan dalam pembangunan sebagai subyek sekaligus sebagai obyek pembangunan itu sendiri. Partisipasi murni harus diartikan bahwa setiap pelaku ekonomi harus ikutserta dalam setiap tahap pembangunan desa sesuai dengan latar belakang, kemampuan atau produktivitasnya dan keahlian masing-masing dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan tenggang rasa untuk kepentingan bersama (Arsyad, 2004; Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, & United Nations Development Programme, 2001).

Tipologi desa dibedakan berdasarkan aspek topografi, kondisi geografis, karakter budaya, pola hidup masyarakat dan aspek kegiatan ekonomi sehingga kondisi ini tentu membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Berdasarkan geografis desa dibedakan menjadi (1) Desa daerah pegunungan/lahan kering, (2) Desa pertanian lahan basah dan (3) Desa pesisir pantai

Dalam konteks pembangunan desa, pemerintah membedakan pengelompokan desa dapat dibagi menjadi 3 yaitu; Desa Swadaya, Desa Swakarya, dan Desa Swasembada.

- 1) Desa Swadaya mempunyai ciri-ciri a) Sebagian besar kehidupan penduduknya masih tergantung pada keadaan alam; b) Hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari; c) Administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik; d) Lembaga-lembaga desa belum berfungsi dengan baik; e) Tingkat pendidikan dan produktivitas penduduknya masih rendah dan f) Belum mampu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri.
- 2) Desa Swakarya (Transisi) memiliki ciri-ciri a) Sudah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri; b) Lembaga sosial desa dan pemerintahan sudah berfungsi; c) Administrasi desa sudah berjalan; d) Adat-istiadat mulai longgar; e) Mata pencaharian mulai beragam; f) Sudah ada hubungan dengan daerah sekitarnya.
- 3) Desa Swasembada memiliki ciri-ciri a) Sarana dan prasarana desa lengkap; b) Pengelolaan administrasi telah dilaksanakan dengan baik; c) Pola pikir masyarakat lebih rasional; d) Mata pencaharian penduduk sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan.

Berdasarkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan partisipatif terdapat tujuh jenis partisipasi yang ditunjukkan secara berturut-turut sebagai berikut: a) Partisipasi Pasif atau Manipulatif, merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah di mana posisi masyarakat hanya menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan, hanya sebagai obyek. b) Partisipasi Informatif, masyarakat hanya dilibatkan sebatas pada memberikan informasi namun tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. c) Partisipasi Konsultatif, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya, namun penentu kegiatan tetap pihak luar. d) Partisipasi Insentif, masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan namun hanya sebagai pekerja yang memperoleh honor/insentif sesuai dengan kinerjanya. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilakukan oleh pihak luar. e) Partisipasi Fungsional, masyarakat secara berkelompok menjadi bagian kegiatan pembangunan. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya. f) Partisipasi Interaktif, masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, serta peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan. g) Mandiri (*self mobilization*), masyarakat mandiri dan mempunyai jejaring melalui pengembangan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan. Pada posisi ini masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan (Mafruhah, 2008; Pranadji, 2006; Rahayu, 2008; Waridin, Dzulkhijiana, & Mafruhah, 2018; Widayati, Waridin, & Mafruhah, 2019).

### 3. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab tujuan pertama yaitu memperoleh potret dari program dan kegiatan yang telah/sedang dilaksanakan saat ini yang kegunaannya diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pacitan, akan dilakukan analisis statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif sehingga bisa menggambarkan kondisi pemberdayaan masyarakat di masing-masing tipologi desa (Creswell, 2014).

Untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu menganalisis situasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan aktivitas inovasi model pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pacitan akan dilakukan dengan menggunakan analisis AHP. AHP merupakan salah satu metode yang memecah suatu masalah kompleks ke dalam kelompok-kelompok secara hirarki. Dengan AHP pembobotan suatu faktor atau variabel dapat dilakukan sesuai dengan persepsi manusia sehingga diharapkan mampu kondisi yang senyatanya (Kuncoro & Rahajeng, 2005). Penelitian ini memecah faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan proses pemberdayaan di dalam masyarakat. Terdapat 3 faktor utama yang dianggap paling berpengaruh yang kemudian diturunkan dalam faktor-faktor di bawahnya. Faktor utama terdiri atas faktor kelembagaan, faktor internal masyarakat dan faktor eksternal masyarakat.

Untuk menjawab tujuan ketiga merumuskan rekomendasi konsep untuk pengembangan inovasi model pemberdayaan masyarakat desa secara komprehensif dan terintegratif di Kabupaten Pacitan akan dilakukan dengan analisis SWOT.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Pelaksanaan Aktivitas Inovasi Model Pemberdayaan Masyarakat**

Penilaian faktor ini akan dilakukan dengan menilai persepsi dari dinas, kecamatan dan desa / kelurahan. Persepsi pertama berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Dari data yang berhasil dikumpulkan terhadap 45 responden ditemukan bahwa 73,33% responden menyatakan program pemberdayaan masyarakat sangat penting, sedangkan 26,67% menyatakan penting. *Indept interview* yang dilakukan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat tentang penentu keberhasilan program pemberdayaan, maka diperoleh jawaban bahwa 89,19% responden menyatakan bahwa kombinasi antara keduanya menentukan keberhasilan pemberdayaan, 8,11% menyatakan bahwa usulan dan partisipasi masyarakat merupakan penentu utama keberhasilan sedangkan sisanya sebanyak 2,7% menyatakan bahwa program pemerintahlah yang paling berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kombinasi antara pemerintah dengan masyarakat merupakan persepsi yang paling banyak dipilih oleh responden sebagai penentu keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Untuk melihat sejauh mana swadaya masyarakat dan stimulant pemerintah maka responden diminta untuk memilih menggunakan persentase, dan diperoleh hasil bahwa 24,32% responden menyatakan persepsinya bahwa program pemberdayaan akan berhasil apabila dana pemerintah pusat sama dengan swadaya yang dimiliki masyarakat atau 50% - 50%. Sedangkan 51,35% responden menyatakan bahwa seharusnya pemerintah mempunyai porsi lebih dalam pendanaan untuk program pemberdayaan yaitu mencapai 75% - 25%, artinya pemerintah memberikan stimulant lebih dalam kegiatan. Kemudian 16,22% responden menyatakan persepsinya bahwa pemerintah sebaiknya mempunyai porsi yang lebih sedikit yaitu 25% - 75%, di mana dana pemerintah hanya bertindak sebagai stimulant dalam program pemberdayaan. Selain itu terdapat 8,10% responden yang menyatakan bahwa seharusnya 100% dana pemberdayaan diberikan oleh pemerintah pusat.

Persepsi selanjutnya adalah tentang pihak yang memiliki peran penting dalam program pemberdayaan masyarakat dengan hasil sebagai berikut 18,92% peran penting dipegang oleh kepala desa, pada daerah perdesaan kepala desa memang memiliki porsi yang paling besar terhadap program pemberdayaan. 8,10% menyatakan bahwa perangkat desa memiliki peran penting dalam program pemberdayaan. Hasil survey dengan kuesioner terstruktur menyatakan bahwa 40,54% pihak yang menentukan keberhasilan pemberdayaan adalah tokoh masyarakat. Kemudian 29,73% menyatakan bahwa pendamping atau fasilitator yang memiliki peranan paling penting terhadap keberhasilan proses pemberdayaan ma-

syarakat. Dan yang terakhir 2,70 responden yakin bahwa program pemberdayaan masyarakat akan berhasil apabila 4 pihak utama dalam pemberdayaan yaitu kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat dan pendamping memiliki peran atau porsi yang sama dalam bidang pemberdayaan.

**Analisis Faktor yang Paling Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan**

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan pada langkah pertama adalah kelembagaan, faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hasil penghitungan AHP diperoleh hasil sebagaimana pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Hasil Analisis Penghitungan AHP pada Faktor Utama

Kriteria	Nilai Prioritas	Peringkat
Kelembagaan	0.345849574	2
Internal	0.379701053	1
Eksternal	0.274449373	3

Sumber: Data primer diolah

Faktor internal diturunkan menjadi empat variabel yaitu variabel pendidikan, potensi daerah, modal sosial dan produksi. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa empat variabel yang berpengaruh mempunyai nilai sebagaimana pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.** Hasil Analisis AHP pada Faktor Internal

Kriteria	Nilai Prioritas	Peringkat
Pendidikan	0.354571578	1
Potensi Daerah	0.236887781	3
Modal Sosial	0.242181375	2
Produksi	0.166359266	4

Sumber: Data primer diolah

Faktor kelembagaan diturunkan menjadi faktor legalitas, peran pemerintah daerah termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, dan faktor geografis. Hasil pengolahan data menunjukkan hasil penghitungan nilai prioritas sebagaimana pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.** Hasil analisis AHP pada Faktor Kelembagaan

Kriteria	Nilai Prioritas	Peringkat
Legalitas	0.3005232	1
Pemda termasuk perangkat desa	0.2604128	2
Tokoh masyarakat	0.2268150	3
Geografis	0.2122490	4

Sumber: Data primer diolah

Penelitian ini menurunkan faktor eksternal menjadi empat variabel yaitu pelatihan, modal, produksi dan pasar. Hasil penghitungan analisis menunjukkan hasil sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.** Hasil analisis AHP pada factor internal

Kriteria	Nilai Prioritas	Peringkat
Pelatihan	0.2668069	2
Modal	0.2138424	3
Produksi	0.2131858	4
Pasar	0.3061649	1

Sumber: Data primer diolah



### Konsep Pengembangan Inovasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa secara Komprehensif dan Integratif

Program pemberdayaan masyarakat harus menerapkan adanya kelembagaan sebagai penarik utama masyarakat untuk bergerak. Inisiasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat baik dalam lingkup desa atau yang lebih kecil lagi akan bermanfaat sebagai pemicu pemberdayaan.

Di sisi lain masyarakat merupakan center atau pusat pemberdayaan yang didorong oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian pada posisi penentu keberhasilan aktivitas tersebut pemberdayaan komunitas dipengaruhi oleh mekanisme pasar, mekanis memproduksi, mekanis sosial dan mekanisme lingkungan.

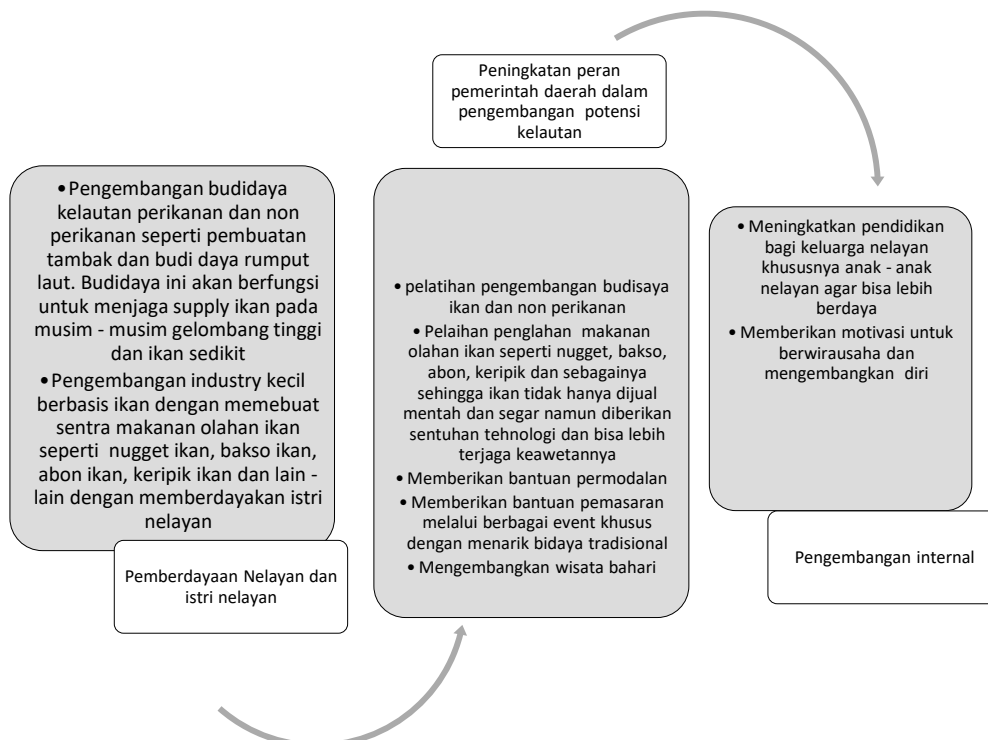
Program pemberdayaan yang tidak melupakan aspek sosial, budaya dan lingkungan selain aspek ekonomi akan mampu mewujudkan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Secara detail terdapat perbedaan pola pemberdayaan masyarakat pesisir dan pedesaan sebagai berikut:

#### Masyarakat Pesisir

Masyarakat nelayan di kawasan pesisir mempunyai permasalahan yang spesifik dalam mata pencahariannya antara lain:

- 1) Adanya masalah alam yang sangat berpengaruh. Ketersediaan ikan sangat tergantung pada faktor musim, demikian juga keberanian dan keamanan untuk melaut sangat dipengaruhi oleh kondisi angin dan gelombang laut.
- 2) Ikan merupakan salah satu bahan mentah yang mudah busuk apabila tidak segera dipasarkan sehingga masyarakat nelayan terpaksa sering menerima permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak
- 3) Rendahnya ekonomi menyebabkan rendahnya pendidikan bagi anak-anak nelayan.

Ketiga permasalahan utama tersebut harus diselesaikan dengan memberikan induksi terhadap masyarakat nelayan khususnya dalam diferensiasi dan pengembangan pengolahan produk. Secara rinci langkah-langkah yang diusulkan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya nelayan adalah sebagai berikut:

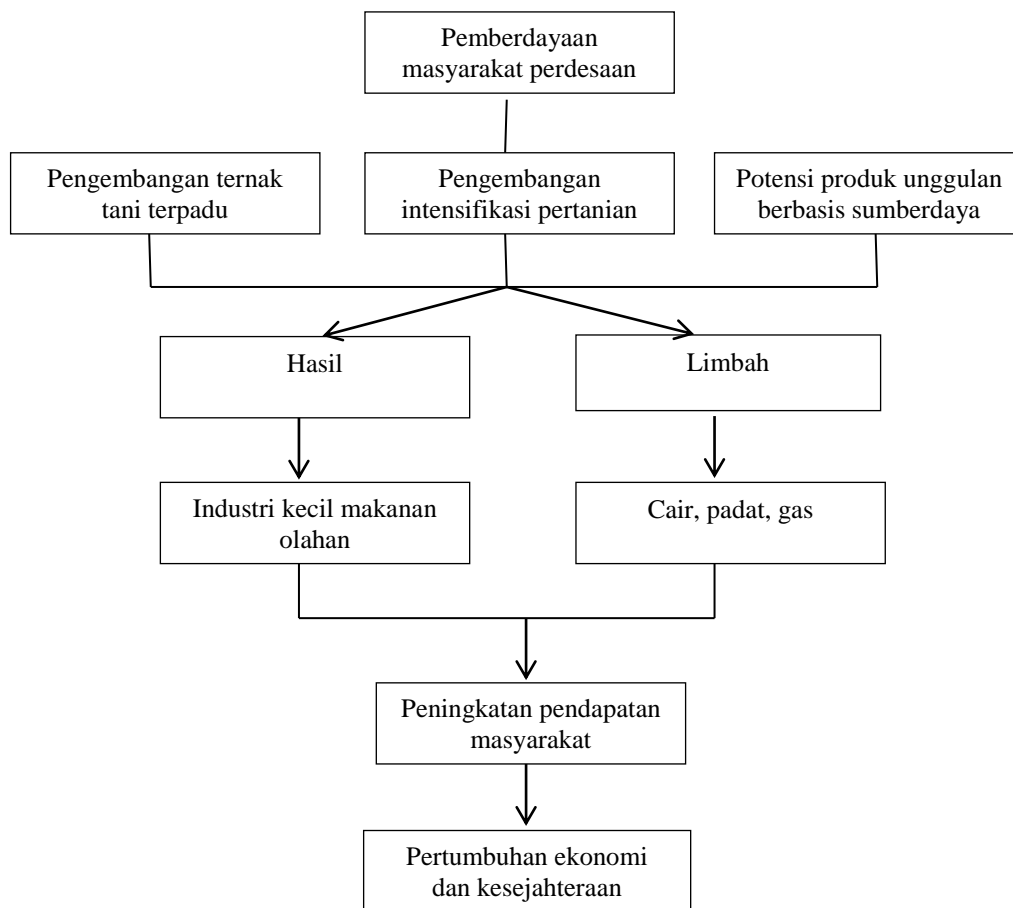


Gambar 1. Model Pemberdayaan Bagi Masyarakat Pesisir (Nelayan)

Model pemberdayaan masyarakat nelayan dimulai dengan 1) Peluang pengembangan usaha budidaya kelautan perikanan dan non perikanan sebagai upaya untuk mengatasi ketergantungan terhadap alam, mengurangi resiko dan juga meningkatkan kontinuitas usaha dan penghasilan. 2) Pengembangan industri kecil berbasis perikanan agar ikan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah namun sudah dalam bentuk olahan sehingga lebih awet dan mempunyai nilai tambah (*value added*) yang lebih tinggi. 3) Pemerintah daerah melalui berbagai model pelatihan, permodalan, sampai dengan pemasaran. Langkah yang dilakukan pemerintah harus berkelanjutan dan ditindaklanjuti dengan memberikan kesadaran serta motivasi secara terus menerus bagi nelayan dan keluarga nelayan. Dengan peningkatan pendidikan akan mengembangkan motivasi bagi nelayan untuk berkembang sendiri dan menjadi mandiri.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini harus dilakukan secara bersama-sama melalui forum ABCG (*Academic, Business, Somunity dan Government*). Penggabungan kekuatan-kekuatan tersebut akan mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya kaum nelayan yang tinggal di daerah pesisir.

**Masyarakat pertanian**



**Gambar 2.** Sistem Ternak Tani Terpadu dalam Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Pertanian

Model pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk lahan datar dan lahan pegunungan hampir sama karena basis utamanya adalah pada pertanian. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki sektor pertanian antara lain:

- 1) Sangat tergantung pada musim dan juga rawan terhadap hama sehingga tingkat keberhasilan panen menjadi tidak menentu

- 2) Kondisi pengairan menyebabkan tidak semua wilayah bisa panen tiga kali setahun dan harus diselingi dengan tanaman palawija yang lain, hal ini juga berguna untuk pengembangan humus.
- 3) Masa tunggu panen yang sekitar 2 bulan belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan sehingga dibutuhkan usaha sampingan yang tidak jauh dari sektor pertanian.

Berdasarkan 3 alasan tersebut maka diusulkan untuk menggunakan sistem pengembangan usaha melalui ternak tani terpadu. Usaha ternak tani terpadu adalah suatu kegiatan di bidang pertanian dan peternakan yang direncanakan secara bersama-sama dalam suatu wilayah dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan masyarakat setempat. Dalam perencanaan diupayakan adanya hubungan yang saling menunjang antara berbagai komoditas yang diusahakan sehingga dapat dicapai hasil usahapertanian dan peternakan yang optimal.

Pada model ini petani bisa mengembangkan usaha ternak dan pertanian secara bersamaan atau terpadu, sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan yang diperolehnya. Berbagai macam jenis ternak bisa diberikan pakan limbah pertanian dan sebaliknya limbah dari ternak bisa digunakan sebagai pupuk untuk peningkatan kesuburan produk pertanian.

Pemberdayaan sistem ternak tani terpadu ini juga mengarahkan pada pengolahan hasil pertanian untuk dijual dalam bentuk makanan olahan jadi bukan hanya bahan mentah pertanian saja. Dengan cara ini maka akan meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat petani.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Pemberdayaan di Kabupaten Pacitan cenderung dipicu oleh program kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Sedangkan peran masyarakat sebagai pelaku dari kegiatan tersebut, swadana masyarakat ditunjukkan dalam bentuk tenaga atau kegotongroyongan yang ada di lingkungan. Jenis kegiatan terdiri atas pembangunan fisik, pelatihan-pelatihan dan simpan pinjam serta bantuan operasional organisasi.
- 2) Faktor yang mendorong pemberdayaan masyarakat terdiri atas 3, yaitu faktor internal, faktor kelembagaan dan faktor eksternal. Sedangkan masing-masing memiliki faktor-faktor turunan yang memberikan pengaruh terhadap program pemberdayaan. Dari hasil *indept interview* dan analisis terhadap kuesioner diketahui bahwa ternyata tipologi daerah tidak memberikan perbedaan perlakuan dan model dalam pemberdayaan masyarakat, hanya sasarannya saja yang dirubah.
- 3) Model pemberdayaan yang perlu diinisiasi untuk masing-masing wilayah membutuhkan peran serta yang menyeluruh baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi dan bisnis dalam kegiatan pemberdayaan.

Rekomendasi yang diusulkan dalam penelitian ini, pertama, perlu pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi terhadap hasil kegiatan pembangunan. Pelibatan ini akan mendorong kesadaran masyarakat dalam proses pemberdayaan. Kedua, titik penting dalam proses pemberdayaan adalah tokoh masyarakat dan fasilitator, sehingga pemerintah harus melibatkan secara langsung dan berkesinambungan kedua unsur tersebut melalui penyamaan persepsi dan visi pemberdayaan sehingga bisa berjalan dengan baik. Proses penyamaan bisa dilakukan dengan mekanisme pelatihan dan FGD. Ketiga, perhatian pemerintah terhadap aspek sosial, budaya dan lingkungan sangat penting karena menjadi salah satu modal sosial yang utama. Kearifan lokal yang berupa gotong royong, kejujuran dan *rumongso melu handar-*



*beni* (rasa ikut memiliki) menjadi bagian penting dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, & United Nations Development Programme. (2001). *Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jakarta: BPS, Bappenas, UNDP.
- Budiharsono, S. (2004). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional*. Jakarta: TKP3KPK Menko Kesra.
- Creswell, J. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed). Los Angeles: Sage Publication Ltd.
- Hassan, M., & Siahaan, W. (2004). *Pemetaan Permasalahan Kemiskinan tentang Kerentanan dan Resiko Sosial yang terkait dengan Perlindungan Sosial*. Jakarta: TKP3KPK Menko Kesra.
- Irawan, P. B. (1999). *Analisis Perkembangan dan Dimensi Kemiskinan*. Jakarta: BPS-UNDP.
- J.Fernández-Moral, M., Vidueira, P., Díaz-Puente, J. M., & Nicolás, V. L. De. (2015). Empowerment Evaluation in Spain: The Critical Friend Role in Working with Rural Communities. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 191, 984–989. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.483>
- Kuncoro, M., & Rahajeng, A. (2005). Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 171 – 184.
- Lipton, M., & Ravallion, M. (1995). Poverty and Policy. In H. Chenery & T. N. Srinivasan (Eds.), *Handbook of Development Economics* (1st ed.). Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.
- LP3ES. (2006). *Kajian Evaluasi Kebijakan Subsidi Langsung Tunai (SLT) untuk Masyarakat Miskin*. Jakarta: LP3ES.
- Mafruhah, I. (2008). Model Sinergisitas Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis UMKM. *Jurnal Policy*.
- Mafruhah, I., & Tuhana. (2008). Pengembangan sistem Ketahanan Pangan dalam Kerangka Penghapusan kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*.
- Partoatmodjo, S. (2004). *Masalah Kemiskinan dan Kompleksitas Penanggulangannya*. Jakarta: TKP3KPK Menko Kesra.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Pranadji, T. (2006). Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering (Studi Kasus di Desa-Desa (Hulu Das) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali). *Jurnal Agro Ekonomi*, 24(2), 178–206.
- Rahayu, M. A. B. (2008). Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. Retrieved from Iskandar Institute website: <http://www.binaswadaya.org/files/Pemberdayaan-masyarakat-desa.pdf>
- Wardhani, A., & Haryadi, M. (2004a). *Akar Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Masyarakat*. Jakarta: TKP3KPK Menko Kesra.
- Wardhani, A., & Haryadi, M. (2004b). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: TKP3KPK Menko Kesra.
- Waridin, W., Dzulkhijiana, A., & Mafruhah, I. (2018). Community Empowerment in Rural

- Infrastructure Development Program. *Economic Journal of Emerging Markets (EJEM)*, 10(1). <https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss1.art2>
- Widayati, T., Waridin, W., & Mafruhah, I. (2019). Between Environmental Performance and Agricultural Productivity: Assessing The Convergence And Divergence of Demand-Driven Agricultural Extension. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(4). <https://doi.org/10.32479/ijeep.7688>